

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya kinerja pemerintah kelurahan tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan langsung kepada warga, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur lokal. Kinerja yang baik dari pemerintah kelurahan mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, serta kemampuan untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lanin (2014) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kelurahan yang optimal juga berdampak positif terhadap tingkat kepuasan warga, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pembangunan.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2019: 4). Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup 2 jenis ukuran, yaitu ukuran yang berorientasi pada proses dan ukuran yang berorientasi pada hasil (Ratminto & Winarsih, 2018: 179).

Dalam konteks ini, kinerja pemerintah kelurahan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola yang baik), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. *Governance* dari sudut

penyelenggaraan negara diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa, mengelola mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks antar warga negara dan kelompok yang menghendaki agar hak dan kewajibannya terlaksana dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan diantara mereka. *Good governance* menjadi landasan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah kelurahan. Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan data dari rekap IKM 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Mangkubumi menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan nilai 87.84 pada Triwulan I, 90.87 pada Triwulan II, 90.90 pada Triwulan III, dan 90.23 pada Triwulan IV. Namun, meskipun nilai IKM tergolong tinggi, masih terdapat keluhan masyarakat terkait lambatnya waktu penyelesaian layanan, seperti yang tercatat dalam Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Cihideung pada tahun 2023, dimana nilai untuk unsur waktu pelayanan hanya mencapai 3.35. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja pemerintah kelurahan secara umum baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal efisiensi pelayanan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tawang Tahun 2023 menunjukkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90.13 dengan predikat Sangat Baik. Unsur pelayanan seperti kewajaran biaya (NIK 100) dan kesesuaian persyaratan pelayanan (NIK 93.2) menjadi keunggulan, sementara penanganan pengaduan (NIK 85.15) dan sikap petugas (NIK 86.475) masih perlu ditingkatkan. Temuan ini memperkuat pentingnya transparansi dan akuntabilitas

dalam pelayanan publik, sekaligus menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui pengaduan belum optimal.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat kelurahan adalah melalui Transfer ke Daerah (TKD), yang menjadi bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 19 September 2024, disetujui Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2025, yang salah satunya mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp446,63 triliun. DAU ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp360,51 triliun dan bagian yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp86,12 triliun, yang salah satunya digunakan untuk dukungan dana kelurahan. Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah akan membagikan dana kelurahan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan di setiap kelurahan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat kelurahan.

Namun, alokasi dana yang besar ini tidak serta-merta menjamin peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang baik, dana tersebut berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, pasca pandemi Covid-19 hingga tahun 2024, anggaran dana kelurahan di Kota Tasikmalaya dibagikan secara merata dengan proporsi yang sama setiap tahunnya. Pada tahun 2023 dan 2024, setiap kelurahan menerima dana sebesar Rp242.500.000 yang bersumber dari DAU Tambahan dan APBD. Namun, 5% dari dana tersebut dialokasikan ke tingkat kecamatan, sehingga tidak sepenuhnya

digunakan untuk program kelurahan. Fakta ini menunjukkan perlunya pengawasan dan pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam pencapaian kinerja pemerintah kelurahan yang baik, pemerintah tidak pernah lepas dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Masyarakat perlu untuk mengetahui bagaimana dana yang secara harfiah berasal dari masyarakat tersebut digunakan. Fenomena ini terjadi dimana informasi tentang pengelolaan dana belum sepenuhnya tersedia untuk publik. Transparansi mencakup kejelasan pelaporan, aksesibilitas data, dan keterbukaan informasi. Fakta ketidakjelasan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kelurahan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa informasi tentang pengelolaan dana kelurahan seringkali tidak tersedia secara terbuka untuk publik. Menurut laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM (bpktasikmalaya. 2024), tingkat transparansi keuangan di Tasikmalaya masih tergolong rendah. Informasi terkait anggaran dan pengelolaan keuangan daerah seringkali sulit diakses oleh masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah kelurahan.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rohaeni (2024), Auditya et al., (2021), Mantasari D et al., (2023), mengungkapkan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Binawati & Badriyah, (2022), Pera et al., (2024), Padilah (2022), mengungkapkan bahwa

transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hal ini disebabkan kurangnya transparansi yang ada di pemerintahan mulai dari proses penganggaran hingga pelaporan penggunaan dana yang mengakibatkan kinerja pemerintah diragukan oleh masyarakat.

Akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah kelurahan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan dan pengeluaran dana. Namun di beberapa kelurahan, pelaporan dan audit penggunaan dana masih lemah. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan anggaran dan program yang tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, telah terjadi kasus korupsi proyek jalan di Kelurahan Setianegara, Kota Tasikmalaya yang melibatkan 5 orang tersangka (detik.com, 2023). Adanya temuan BPK terkait dengan kekurangan volume pekerjaan jalan menunjukkan bahwa betapa lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi, sehingga proyek yang dicanangkan tidak terlaksana dengan baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Patty (2024), Kumalasari & Widajantie (2022), (Flora et al., 2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, yang artinya bahwa pemerintah sebagai pengelola sumber daya dan masyarakat yang memiliki sumber daya tersebut memiliki kesepakatan penuh terhadap kepercayaan sehingga kinerja pemerintah daerah meningkat. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Rosita & Asrini, 2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, hal ini dapat disebabkan lemahnya

akuntabilitas terutama dalam hal akuntabilitas manajerial, pertanggungjawaban penyusunan laporan kinerja, pertanggungjawaban pengelolaan organisasi, penguasaan jabatan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah kelurahan. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan warga secara aktif dalam proses manajemen dana kelurahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Di Tasikmalaya, partisipasi masyarakat relatif rendah (bpktasikmalaya. 2024). Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang pentingnya keterlibatan warga. Konsep partisipasi masyarakat mencakup pemberdayaan warga, konsultasi publik, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Proses pengawasan dan masukan konstruktif dari warga dapat terhambat oleh fenomena kurangnya partisipasi ini.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kelurahan Kahuripan Tahun 2025, masyarakat aktif mengusulkan berbagai program pembangunan, seperti pembangunan drainase, peningkatan jalan lingkungan, dan pengadaan sarana prasarana. Namun, belum ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa usulan tersebut diakomodasi dalam penganggaran dan pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Dari Musrenbang Kelurahan Kahuripan Tahun 2025, terdapat banyak usulan kegiatan dari masyarakat yang belum terealisasi, seperti pembangunan drainase di Jl. Cikalang Girang RT. 01, RT. 03, RT. 04 di RW. 04, yang memerlukan perbaikan pipa saluran sepanjang 350 m dan storbak kontrol sebanyak 44 titik. Selain itu,

usulan peningkatan jalan lingkungan di Paledang RT. 01 RW 05 dengan panjang 300 m dan lebar 2 m juga masih menunggu realisasi. Beberapa usulan lainnya, seperti pengadaan lampu PJU di Margalaksana RT. 2, RT. 3, RT. 4, RT. 6 di RW.06 dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat aktif berpartisipasi dalam mengusulkan program pembangunan, masih ada tantangan dalam realisasi program tersebut yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kelurahan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Emilia & Abdullah (2021), Wirdayanti & Budiwitjaksono (2021), Wahyudi (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, maka semakin meningkatnya partisipasi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat terhadap berjalannya kepemerintahan. Ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Auliyah & Pratoyo (2024) yang menunjukkan bahwa partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan (Sensus pada Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tahun 2025)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan pokok yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, Partisipasi Masyarakat, dan Kinerja Pemerintah Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan secara simultan terhadap Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan secara parsial baik terhadap Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data dan menyimpulkan serta mengetahui:

1. Untuk mengetahui Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, Partisipasi Masyarakat, dan Kinerja Pemerintah Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya

2. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan secara simultan terhadap Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan secara parsial terhadap Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berfikir, sehingga dapat menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman khususnya mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan.

2. Bagi Pihak Kelurahan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pentingnya Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi Masyarakat untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang sekiranya mampu memberikan manfaat sebagai bahan pembanding dan petunjuk untuk penelitian pada masalah yang sama atau penelitian selanjutnya.

4. Bagi Universitas Siliwangi

Hasil penelitian ini dapat memperkaya perbendaharaan di perpustakaan Universitas Siliwangi sekaligus bahan pembanding bagi rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap permasalahan serupa dimasa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada 19 kelurahan yang tersebar di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dimulai pada bulan september tahun 2024 sampai dengan Oktober tahun 2025 dengan rincian tertera dalam lampiran 1.